



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**UNIT KERJA** : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RA VERONICA RATIH
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 778433

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 6.934.324.986

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/113 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 641.175.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/51 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 880.988.986
3. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/113 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.084.800.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 337.336.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 831.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.381.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/133 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 777.525.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 309.733.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 57.293.000
2. MOBIL, VW MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 252.440.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. ---



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.244.057.986
III. HUTANG	Rp.	327.916.283
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.916.141.703

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.